

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini, interdependensi antarnegara untuk pemenuhan kebutuhan nasionalnya semakin meningkat. Suatu negara tidak bisa memenuhi setiap kebutuhan negaranya sendiri. Oleh karena itu, interdependensi antarnegara semakin menguat. Interdependensi negara bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan namun juga untuk penguatan dan pertumbuhan ekonomi. Ditambah pada era globalisasi, jarak dan batas-batas negara bisa dikatakan hilang. Sehingga setiap negara semakin mudah untuk menjalin hubungan ekonomi. *Free Trade Agreement* (FTA) bermunculan seiring dengan perkembangan globalisasi untuk mengatur dan mempermudah akses pasar.

Pasca reformasi, Indonesia terus menjalin hubungan dengan negara-negara lain untuk memperkuat perekonomiannya. Tolak ukur kekuatan suatu negara sekarang ini tidak lagi berpatokan pada kekuatan militer. Perekonomian menjadi hal yang utama sekarang ini dan bisa dijadikan sebagai patokan kekuatan suatu negara. Sehingga penguatan ekonomi menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh setiap negara. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara berkembang juga berpartisipasi secara maksimal untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan perekonomiannya melalui berbagai FTA demi tercapainya kepentingan nasional. FTA menjadi sarana bagi suatu negara untuk meningkatkan perekonomiannya serta daya saing.

Dengan semakin terbukanya akses pasar membuat Indonesia ingin ikut ambil andil di dalamnya. Indonesia terutama pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sangat membuka diri kepada internasional. Kebijakan luar negeri Indonesia pada saat itu yang menganut “*Million Friends, Zero Enemies*” menjadi tanda bahwa Indonesia ingin menjalin hubungan yang baik kepada semua negara. Bukan hanya menjalin hubungan yang baik saja namun hal tersebut juga untuk kepentingan negara Indonesia. Indonesia membutuhkan dunia internasional untuk meningkatkan perekonomiannya. Langkah yang diambil adalah melalui aktifnya Indonesia dalam forum-forum internasional sebagai upaya meningkatkan investasi ekonomi seperti *Asia-Pacific Economic Cooperation* dan *Association of Southeast Asian Nation*.

Terjadi perubahan besar pada kebijakan luar negeri era Susilo Bambang Yudhoyono yang membedakan dengan presiden-presiden sebelumnya karena mulai terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis. Dapat kita lihat bahwa Indonesia banyak melakukan perjanjian bilateral dengan Amerika, India, Jepang, dan Australia.¹ Kemitraan ini dibutuhkan oleh Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Indonesia pasca reformasi. Kemitraan akan berdampak secara langsung kepada negara Indonesia. Salah satu implementasi perjanjian kerja sama bilateral dapat dilihat antara Indonesia dan Australia. Kemitraan strategis Indonesia mulai terjalin erat dengan Australia pada era Susilo Bambang Yudhoyono.

¹ Tamara Shidazhari. “Politik Luar Negeri RI: Era Susilo Bambang Yudhoyono.” Accessed February 23, 2020. [http://tamara-shidazhari-fisip16.web.unair.ac.id/artikel_detail-212362-Studi Strategis Indonesia II Politik Luar Negeri RI-Politik Luar Negeri RI: Era Susilo Bambang Yudhoyono.html](http://tamara-shidazhari-fisip16.web.unair.ac.id/artikel_detail-212362-Studi%20Strategis%20Indonesia%20II%20Politik%20Luar%20Negeri%20RI-Politik%20Luar%20Negeri%20RI:%20Era%20Susilo%20Bambang%20Yudhoyono.html).

Australia merupakan negara maju dengan ekonomi terbesar yang berada di posisi ke-14 diukur dari *Gross Domestic Product* (GDP).² Australia merupakan negara tetangga Indonesia yang juga menjadi mitra dagang Indonesia. Australia memiliki potensi yang sangat besar bagi Indonesia untuk menjalin kemitraan yang strategis serta untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Akan tetapi, perjalanan hubungan kedua negara ini memiliki sejarah yang panjang. Indonesia dan Australia memiliki hubungan yang dapat dikatakan pasang surut sejak kemerdekaan Indonesia. Sering terjadi ketegangan di antara keduanya akibat banyak hal, baik adanya konfrontasi secara langsung maupun tidak langsung.

Namun Indonesia dan Australia terus memperbaiki hubungannya menjadi lebih baik. Relasi keduanya semakin terjalin erat ketika adanya *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* (JDCP) yang dideklarasikan keduanya pada tahun 2005. Dengan adanya deklarasi ini tentu menjadi babak baru hubungan kedua negara ini. Hal ini juga yang memprakarsai agar terbentuknya *Comprehensive Economic Partnership* (CEPA) di antara kedua negara untuk mempererat hubungannya.³ Kedua negara memutuskan untuk serius dalam menjalin hubungan bilateralnya. Selanjutnya dilakukan penyusunan studi kelayakan sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan pada tepatnya Desember 2007 – Februari 2009 yang melibatkan berbagai pihak. Pihak yang ikut serta dalam studi kelayakan yaitu pemerintah,

²“Australia Is a Top 20 Country.” *Department of Foreign Affairs and Trade*. Last modified Juli 9, 2019. Accessed February 23, 2020. <https://dfat.gov.au/trade/resources/publications/Pages/australia-is-a-top-20-country.aspx>.

³ ditjenppi. *Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional*. Direktorat Jenderal. Available From <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/asia-tenggara-dan-pasifik/australia>. accessed 23 Februari 2020.

swasta, dan akademisi kedua negara. Hal ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam potensi apa yang didapat dari kerja sama bilateral dan kemungkinan hambatan-hambatan yang dapat terjadi dalam hubungan ekonomi kedua negara.⁴

Berdasarkan hasil studi kelayakan pada tahun 2008, Indonesia-Australia *Economic Comprehensive Partnership* (IA-CEPA) akan meningkatkan PDB Indonesia sebesar 0,23% dari *baseline* sebesar AUD 33,1 miliar pada tahun 2030 atau AUD 1,65 miliar per tahun.⁵ Sehingga setelah melalui tahap-tahap studi kelayakan tersebut, akhirnya pada 2 November 2010 peluncuran IA-CEPA dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar keduanya memiliki hubungan bilateral yang jauh lebih kuat, bukan hanya hubungan bilateral biasa namun hubungan ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita:

“Penyelesaian IA-CEPA ini merupakan tonggak sejarah baru dalam hubungan ekonomi Indonesia – Australia. IA-CEPA bukanlah *Free Trade Agreement* (FTA) biasa, tetapi sebuah kemitraan komprehensif di bidang perdagangan barang, jasa, investasi, dan kerja sama ekonomi. Biasanya FTA hanya menegosiasikan akses pasar, tetapi CEPA dengan Australia ini mencakup juga kerja sama bagaimana kedua negara dapat tumbuh bersama memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk menciptakan kekuatan ekonomi baru di kawasan.”⁶

Oleh karena itu, IA-CEPA menjadi perjanjian kerja sama yang komprehensif bagi keduanya seperti apa yang dikatakan oleh Menteri Perdagangan,

⁴ ditjenppi. *Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional*. Direktorat Jenderal. Available From <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/asia-tenggara-dan-pasifik/australia>. accessed 23 Februari 2020

⁵ ditjenppi. “IA-CEPA.” *Direktorat Perundingan Bilateral*. Available From http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20190311_fact-sheet-indonesia-australia-cepa2.pdf. accessed 23 Februari 2020.

⁶ ditjenppi. “IA-CEPA.” *Direktorat Perundingan Bilateral*. Available From http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20190311_fact-sheet-indonesia-australia-cepa2.pdf. accessed 23 Februari 2020.

bahwa CEPA bukan perjanjian dagang seperti biasanya. Terbentuknya CEPA tentu harus menguntungkan bagi keduanya. Sehingga perekonomian kedua negara dapat meningkat karena terbukanya akses pasar yang lebih luas bagi keduanya. Namun kita harus melihat lebih dalam proses perundingan IA-CEPA memakan waktu yang cukup lama. IA-CEPA memakan waktu selama 10 tahun hingga dapat diratifikasi. Pada akhirnya Indonesia baru bisa meratifikasi perjanjian ini pada awal Januari 2020 yang didahului oleh Australia pada November 2019.

Negosiasi menjadi hal yang harus diperhatikan dan penting untuk diperhatikan sebelum kedua negara mengesahkan ataupun melanjutkan untuk melakukan perjanjian tersebut. Proses perundingan sebuah perjanjian tidaklah mudah untuk dilakukan dan memerlukan berbagai tahapan. Di tengah proses perundingan menuju CEPA, kedua negara banyak sekali menghadapi tantangan dan hambatan. Kedua negara harus bisa menghadapi setiap tantangan dan hambatan agar dapat mencapai hasil akhir yang diinginkan kedua belah pihak. Proses negosiasi IA-CEPA tidak terlepas dari dinamika politik kedua negara. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dan Australia memiliki hubungan yang pasang surut secara sejarah. Hal ini terulang kembali di tengah proses perundingan IA-CEPA.

Pada awal perundingan yaitu tahap 1 dan 2, perundingan harus dihentikan karena adanya dinamika politik yang terjadi. Pada saat itu Presiden Indonesia mengalami hal yang tidak diinginkan dari pihak Australia. Kasus tersebut membuat panasnya hubungan kedua negara dan memberhentikan sementara perundingan IA-CEPA. Adanya hubungan yang kembali memanas tersebut membuat proses

negosiasi IA-CEPA terhenti selama 3 tahun sebelum dilanjutkan kembali nantinya akibat dinamika politik kedua negara. Sehingga proses negosiasi antara kedua negara menuju CEPA menjadi hal yang sangat menarik untuk diperhatikan.

Mengacu pada fakta-fakta di atas, penulis berharap bahwa penelitian ini juga memiliki signifikansi bagi para pembacanya. Dengan meneliti dan menganalisis dinamika proses perundingan tersebut pembaca diharapkan dapat memahami bagaimana proses perundingan Indonesia-Australia menuju CEPA dengan memerhatikan berbagai aspek di dalamnya. Topik penelitian ini sangat penting baik secara akademis maupun praktis agar mampu mengidentifikasi setiap permasalahan yang terjadi dalam hubungan internasional. Terutama dalam memahami proses perundingan bilateral antarnegara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya mengenai proses negosiasi antara Indonesia-Australia menuju CEPA, khususnya yang terjadi dalam kurun waktu 2009-2019. Penulis mengajukan tiga rumusan masalah yang nantinya akan menjadi fokus dari penelitian penulis. Berikut pertanyaan yang diajukan oleh penulis:

1. Bagaimana proses negosiasi Indonesia-Australia menuju *comprehensive economic partnership agreement*?
2. Pengajaran apa yang didapat proses perundingan Indonesia-Australia menuju *comprehensive economic partnership*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan dan data yang membahas secara jelas tentang proses negosiasi Indonesia-Australia menuju CEPA dalam segala aspek. Mengetahui secara terperinci bagaimana proses negosiasi antara Indonesia dengan Australia menuju *Comprehensive Economic Partnership* (CEPA). Selain itu, mengetahui tantangan dan hambatan yang ada dalam proses negosiasi serta strategi ataupun langkah yang diambil untuk menghadapi tantangan dan hambatan tersebut. Dan juga untuk melihat kejadian-kejadian apa saja yang menarik perhatian selama proses perundingan ini berlangsung. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat membantu para penstudi untuk mendapatkan gambaran yang jelas.

1.4 Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini berguna untuk memberikan informasi ataupun pemikiran mengenai proses perundingan Indonesia-Australia menuju CEPA. Sehingga para pembaca dapat memahami dan mengkritisi kebijakan ataupun strategi yang diambil dalam proses negosiasi Indonesia-Australia menuju CEPA. Adapun penulis berharap menambah wawasan bagi pembaca mengenai perjanjian Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership*. Serta menjadi pegangan bagi penulis dalam upaya pengembangan akademik serta studi Hubungan Internasional secara umum.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bagian. Sistematika tersebut terdiri dari:

BAB I : Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian serta cakupan apa saja yang akan menjadi inti dari pembahasan penelitian ini. Terdapat tiga rumusan masalah yang diajukan oleh penulis, yang menjadi acuan penulis dalam membahas topik penelitian. Dalam bab ini juga, berisi tujuan, kegunaan, dan signifikansi penelitian ini.

BAB II : Bab ini, menjelaskan kerangka berpikir yang terdiri daritinjauan pustaka mengenai studi terdahulu yang topiknya berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu, bagian ini juga berisi tentang tinjauan teori dan konsep-konsep yang akan menjadi acuan penulis dalam menganalisa bagian pembahasan.

BAB III : Bab ini akan menjelaskan metodologi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Penjelasan mencakup pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, metode penelitian yang menggunakan metode sejarah, serta teknik pengumpulan data serta Teknik analisis data.

BAB IV : Bab ini berisi tentang pembahasan dari dua rumusan masalah yang diajukan oleh penulis dalam penelitian. Sebelum membahas secara mendalam setiap rumusan masalah yang diajukan, penulis menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran umum perjanjian bilateral *Indonesia-Australia*

Comprehensive Economic Partnership. Hingga pada akhirnya dapat melihat analisa serta pandangan penulis mengenai proses perundingan tersebut.

BAB V : Bab ini akan berisi tentang kesimpulan yang meliputi semua pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga memberikan saran singkat mengenai kebijakan yang sebaiknya diambil dalam proses negosiasi Indonesia-Australia menuju CEPA.

